



Judul : Brantas Judi Online Blokir Situsnya Ciduk Bandarnya
Tanggal : Jumat, 08 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Berantas Judi Online Blokir Situsnya Ciduk Bandarnya

ANGGOTA Komisi III DPR M Rano Alfath meminta Polri serius memberantas judi *online*. Dia mengapresiasi upaya yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini. Namun, kejahatan judi online saat ini semakin mengkhawatirkan.

"Saya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan instansi terkait, seperti pemblokiran situs-situs yang disinyalir merupakan judi online. Namun, sekarang situasinya sudah semakin genting dan butuh perhatian lebih lanjut," ujar Rano, kemarin.

Rano menilai, kejahatan judi online telah menggerogoti masyarakat. Mereka yang kalah menjadi depresi, terlilit utang, bahkan nekat mengakhiri hidup.

"Judi online ini bagaikan penyakit yang menggerogoti masyarakat kita dari dalam," ucap Rano.

Untuk itu, dia meminta instansi terkait agar lebih masif lagi melakukan pemblokiran dan proses hukum semua pihak yang terlihat dalam judi online.

"Saya minta usaha Polri lebih dimasifkan lagi. Blokir dan proses hukum semua pihak yang terlibat mulai bandar, agen, pelaku dan bekingan-bekingan para judol. Termasuk public figure yang diduga turut mempromosikan," kata politisi PKB ini.

Dia mengatakan, rakyat memonitor sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan judi online ini.

Dia mengajak Polri menunjukkan kehadiran negara menghadapi kejahatan judi online.

"Rakyat sudah pasti monitor. Kita tunjukkan negara hadir untuk melindungi mereka dari kejahatan finansial ini," katanya.

Anggota Komisi III DPR

Achmad Baidowi mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online. Satgas ini terdiri dari lintas sektoral dan instansi, baik Polri, Kemenkominfo, OJK, PPATK dan masyarakat.

"Kami ingin Satgas ini di bawah langsung Menko Polhukam Mahfud MD. Ini sudah darurat dan korbannya masyarakat bawah," kata Awiek sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada media, di Jakarta, kemarin.

Awiek juga mengungkapkan tindakan Kemkominfo yang memblokir akun-akun pengguna judi online perlu diikuti oleh instansi lain. Pihak OJK dan PPATK perlu juga melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap rekening yang diduga menjadi sarana transaksi mencurigakan dari judi online.

Berdasarkan laporan PPATK, pada 2022 ada Rp 155 triliun yang diduga bagian transaksi mencurigakan dari judi online. Jumlah ini diprediksi akan naik pada 2023 hingga Rp 200 triliun.

Melihat data dengan nilai transaksi yang cukup fantastis tersebut, dia meminta Pemerintah bergerak cepat memberantasnya.

"Jika perlu, ada sikap tegas Pemerintah tentang perang melawan judi. Sebab, dampaknya sudah sangat membahayakan bagi masyarakat," jelas anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain itu, Awiek juga menyoroti fenomena *influencer* dan selebriti yang menjadi agen promo judi online. Dia menilai, perlu edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis game online yang masuk kategori judi. ■ KAL